



# POLITICOS:

## Jurnal Politik dan Pemerintahan

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/politicos/index>

## Melampaui Politik Identitas: Elaborasi Publik dalam Meretas Kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan

Dhavid Kristofel Dira Tome dan Yaspis Edgar N. Funay

Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga

Correspondence E-mail: [yaspis.edgar@gmail.com](mailto:yaspis.edgar@gmail.com)

### Abstract

*This paper will describe and analyze the elaboration of government programs and realities that occur in society as one of the strengths to create a system of integration in the context of poverty in South Central Timor. Furthermore, the article was appointed to show how the identity politics of local communities not only become a symbol of resistance but can also be synergized as a critical space in order to achieve an ideal social transformation. Therefore, the method used in collecting data in the form of reviewing the facts of literature sources will then be tested for relevance to the reality of poverty that is happening in the community. Using Manuel Castells' theory of identity and Peter Blau's explanation of social exchange, this paper will examine the extent to which the incorporation of the values or habits of local communities and government policies can play a role in cracking poverty in the context of South Central Timor. In the end, this paper will also explore the benefits of a mutually beneficial relationship between grassroots residents and the government as a political elite to support economic development and community maturity.*

**Keywords:** Politics, Identity, Poverty, and Social Elaboration.

### Abstrak

Tulisan ini akan mendeskripsikan dan menganalisa elaborasi program-program pemerintah dan realita yang terjadi dalam masyarakat sebagai salah satu kekuatan untuk menciptakan sebuah sistem integrasi dalam konteks kemiskinan di Timor Tengah Selatan. Lebih lanjut, tulisan diangkat guna menunjukkan bagaimana politik identitas masyarakat lokal tidak hanya menjadi simbol perlawanan saja, tetapi juga dapat disinergikan sebagai ruang kritis guna mencapai sebuah transformasi sosial yang ideal. Maka dari itu, metode yang digunakan dalam pengumpulan data berupa pengkajian fakta-fakta sumber literatur dan dilengkapi dengan temuan hasil wawancara, kemudian akan diuji relevansinya dengan realitas kemiskinan yang sedang terjadi di masyarakat. Menggunakan teori identitas Manuel Castells dan penjelasan pertukaran sosial dari Peter Blau, tulisan ini akan mengkaji sejauh mana penggabungan nilai-nilai atau kebiasaan masyarakat lokal dan kebijakan pemerintah dapat berperan dalam meretas kemiskinan dalam konteks Timor Tengah Selatan. Pada bagian akhir, tulisan ini juga akan mengeksplorasi manfaat hubungan saling menguntungkan antara penduduk akar rumput dan pemerintah sebagai elite politik guna menunjang pembangunan ekonomi dan pendewasaan masyarakat.

**Kata Kunci:** Politik, Identitas, Kemiskinan, dan Elaborasi Sosial.

**How to Cite:** Tome, D, K, D., Funay, Y, E, N. (2021). Melampaui Politik Identitas: Elaborasi Publik dalam Meretas Kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. *POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 1 (1): 14-23

## 1. PENDAHULUAN

Tulisan ini bermaksud mengeksplorasi ide besar berupa elaborasi kritis antara masyarakat lokal dan pemerintah dalam melahirkan sebuah keputusan dan program guna meretas kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Lebih dalam, penulis mencoba melihat politik identitas dari sudut

pandangan yang berbeda dan lebih positif sehingga dapat menjembatani kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat. Pembahasan mengenai politik identitas telah diteliti oleh beberapa ahli. Stuart Hall menjelaskan bahwa identitas seseorang tidak dapat dilepaskan dari kesadaran terhadap ikatan kolektivitas. Identitas kemudian diinformasikan sebagai sesuatu yang membuat seseorang memiliki berbagai persamaan dengan orang lain, maka pada saat yang sama juga memformulasikan keberbedaan (Setyaningrum, 2005). Senada dengan itu, Amartya Sen mengartikan identitas lebih kepada proses pengkategorian seseorang kedalam satu kelompok kesamaan yang khas (Sen, 2016). Atas fakta ini kemudian banyak penganut setia komunitarianisme menyebarkan sebuah ilusi menyakinkan bahwa identitas komunitas tidak hanya merupakan suatu yang penting, melainkan juga menentukan segalanya, seolah secara kodrati ia merupakan suatu yang terberi, tanpa perlu campur tangan manusia (Sen, 2016). Disamping itu, Cressida Heyes juga menjelaskan bahwa politik identitas merupakan penandaan politis dalam pengertian yang lebih luas dan teoritis berdasarkan pengalaman-pengalaman ketidakadilan yang dialami golongan tertentu, sehingga dapat menghimpun solidaritas untuk memperjuangkan derajat dan martabatnya (Heyes, 2007).

Di Indonesia penelitian tentang dinamika politik identitas telah dilakukan oleh Denny J. A. Ia mengatakan bahwa pada akhirnya kita harus menyadari bahwa dimensi perbedaan akan menghasilkan sebuah konflik. Tidak dapat dipungkiri bahwa konflik identitas ini acapkali memiliki komponen ekonomi di dalamnya. Dominasi, isolasi, dan pemusnahan kemusiaan menjadi kultur dan orientasi nilai yang diemban para pelaku politik identitas jika tidak segera ditangani (Denny, 2006). Disamping itu, Siti Musdah Mulia dalam tulisannya mengatakan bahwa politik identitas yang dibangun dan bermunculan di banyak wilayah Indonesia memperlihatkan kecenderungan dua pola, yaitu positif dan negatif atau bahkan destruktif. Dalam prinsip tersebut, satu istilah mendominasi yang lainnya. Pihak satu dianggap sebagai pusat, prinsip dan titik tolak, sedangkan yang lainnya hanya diposisikan sebagai sampingan, marjinal atau pinggiran, bahkan musuh (Mulia, 2012).

Namun, penelitian-penelitian tersebut masih meninggalkan celah karena belum melihat bagaimana politik identitas tidak hanya dijadikan sebagai perlawanan masyarakat lokal (*local resistance*), tetapi juga dapat menjadi harapan sosial (*social-hope*) untuk menciptakan sebuah transformasi dalam meretas kemiskinan. Celah tersebut yang secara khusus akan dieksplorasi oleh penulis dalam artikel jurnal ilmiah ini. Sehingga tulisan ini nantinya akan mencapai tujuan penelitian berupa menganalisa sejauh mana elaborasi nilai-nilai atau kebiasaan masyarakat lokal dan kebijakan pemerintah dapat berperan guna meretas kemiskinan dalam konteks Timor Tengah Selatan. Penulis lebih khusus memilih lokus penelitian di Kabupaten Timor Tengah Selatan karena berdasarkan data dari BPS tahun 2020, kabupaten yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di provinsi NTT yaitu kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 mencapai 27,87% (130.310 jiwa) (Statistik, 2019). Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa persoalan kemiskinan merupakan salah satu persoalan terbesar di NTT yang tidak hanya dapat ditangani oleh pihak pemerintah saja, namun juga membutuhkan campur tangan dari seluruh elemen masyarakat yang ada.

Untuk menganalisa peran politik identitas, penulis akan menggunakan teori Manuel Castells yang mengatakan bahwa pemaknaan identitas bisa dibagi menjadi tiga tipe, yaitu legitimasi identitas, resisten identitas, dan proyek identitas. Bentuk-bentuk identitas tersebut nantinya dapat menjadi sebuah sistem interaksi yang diangkat dari sebuah kesamaan identitas kolektif dan pemaknaannya akan sebuah masalah yang sedang terjadi. Namun situasi ini nantinya dapat menghasilkan sebuah pencampuran identitas jika didasari dengan kesadaran adanya sebuah tekanan dan kontradiksi antara representasi diri (*self representatif*) dan aksi sosial (*social action*) (Castells, 2010).

Sementara itu untuk melihat relasi pertukaran sosial dan elaborasi yang dapat terjalin antara politik identitas dan peretasan kemiskinan, teori Peter Blau akan membantu penulis. Ia mengatakan bahwa sebuah proses pertukaran sosial yang terjadi akan menghasilkan sebuah fenomena baru dalam

bentuk struktur yang kompleks dan didasari oleh hubungan yang saling menguntungkan (Johnson, 2008). Hal ini menjadi penting guna menghindari ketidakseimbangan dalam relasi pertukaran yang berbeda status dan kekuasaan. Secara singkat, Blau mengatakan bahwa individu yang memiliki keahlian akan berbagi dengan rekan-rekan yang kurang pengalaman, kemudian mereka akan mengembangkan peringkat yang berbeda, dengan menggunakan perbedaan pengetahuan yang dimiliki (Blau, 1964).

## **2. METODE**

Metode dalam kajian ini menggunakan studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan dengan mengumpulkan data-data sebagai fakta yang benar melalui sumber-sumber literatur. Lebih lanjut, penulis juga akan menggunakan data pelengkap berupa realitas sosial yang sedang terjadi, baik dari wawancara langsung maupun melalui surat kabar, ataupun diskusi.

Pertama-tama dipaparkan perspektif kajian teori identitas dan ranah-ranah cakupan identitas yang dimaksud. Hal ini dilakukan untuk memberi gambaran tentang adanya untuk kesamaan yang mengikat sekaligus membatasi seseorang dengan manusia atau komunitas yang lain. Bagian kedua penulis mencoba memetakan elaborasi sosial yang juga dapat menjadi sebuah sistem pertukaran yang saling menguntungkan antara elite politik dan masyarakat akar rumput, termasuk pemenuhan unsur-unsur dan proses-proses yang ada didalamnya. Bagian terakhir menguraikan sejumlah perspektif serta menarik benang merah antara teori, analisis data, dan temuan-temuan yang dihasilkan.

Setelah melakukan dan menghubungkan langkah-langkah diatas, tulisan ini diharapkan memberi bingkai elaborasi yang ideal dan dapat di relevansikan dengan konteks permasalahan kemiskinan yang sedang dihadapi.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Lingkaran Kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan***

Kemiskinan merupakan hal klasik yang belum tuntas terselesaikan terutama di Negara berkembang, artinya kemiskinan menjadi masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian di setiap Negara (Amelia, 2012). Fakta inilah yang saat ini juga terjadi di Nusa Tenggara Timur terkhususnya Kabupaten TTS. Kabupaten termiskin yang ada di NTT yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan dikarenakan, secara topografis wilayah Kabupaten TTS memiliki curah hujan yang rendah sehingga lahan di wilayah tersebut umumnya kering dan tandus, selain itu sektor pertanian (95,3 Persen) masih memegang peranan penting karena sebagian besar penduduk bekerja dan mengandalkan hidupnya dari pertanian (80 Persen) (Amelia, 2012).

Selain faktor alam yang dimiliki oleh kabupaten Timor Tengah Selatan, kelanggengan kemiskinan juga disebabkan oleh tingkat melek pendidikan yang rendah. Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki jumlah total penduduk sampai tahun 2018 sebesar 465.970 jiwa, yang terdiri dari 229.689 jiwa laki-laki dan 236.281 jiwa perempuan. Lebih lanjut statistik menunjukkan tingkat kepadatan penduduk sebesar 116 jiwa/Km<sup>2</sup> dari total luas Kab.TTS 3.955,36 Km<sup>2</sup>. Melihat data kependudukan diatas, sebanyak 87.13% penduduk usi 15 tahun keatas sudah melek huruf atau sudah bisa membaca. Akan tetapi sebanyak 10.77% penduduk berusia 15 tahun keatas tidak pernah bersekolah. Serta hanya 22,30% penduduk berusia 15 tahun keatas yang memiliki ijazah SMA ke atas. Hal ini membuktikan bahwa tingkat pendidikan di TTS masih sangat rendah (BPS, 2011). Data ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Jacobis Johanis Messakh, yang mengatakan bahwa kualitas pendidikan di Kabupaten TTS masih tergolong rendah dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi NTT bahkan Indonesia. Kendala utama rendahnya kualitas pendidikan di Kabupaten TTS adalah antara lain: kesiapan SDM tenaga pendidik, sarana prasarana pendidikan yang sangat terbatas,

jumlah dan sebaran tenaga pendidik yang tidak berimbang antara daerah perkotaan dan pedesaan, akses pendidikan yang terbatas, sampai kepada masalah manajerial lembaga pendidikan, kesadaran dan partisipasi orang tua dan swasta dalam mendukung pendidikan serta masalah lainnya (Messakh & Punuf, 2020).

Faktor-faktor di atas semakin diperparah dengan adanya sebuah kebiasaan atau budaya masyarakat setempat terkhususnya di daerah yang “diperintah” oleh seorang pemimpin lokal. Daerah yang diperintah oleh seorang raja pada umumnya akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintah seorang raja. Salah satu kebiasaan itu adalah tidak melakukan seluruh rangkaian proses menanam sebelum diperbolehkan oleh pemimpin lokal (raja) yang menguasai tanah atau wilayah tersebut. Dengan kata lain bisa dikatakan bahwa masyarakat atau penduduk setempat boleh melakukan kegiatan bercocok tanam setelah raja tersebut melakukannya terlebih dahulu. Hal ini di karenakan juga tanah yang digunakan oleh penduduk sebagian besar adalah milik raja. Lebih lanjut menurut pendeta Kartini Bisingsi, realita ini jelas berdampak pada terhambatnya kemajuan mutu hidup masyarakat dan berdampak pula terhadap dimensi ekonomi penduduk yang menetap di daerah tersebut.

Selain permasalahan pola bercocok tanam, ada pula problem serius yang terjadi dari sisi masyarakat lokal (akar rumput), yaitu berupa kebiasaan berlebihan dalam mengadakan sebuah acara adat atau sejenisnya. Dalam konteks kehidupan masyarakat lokal, acara-acara adat seperti pernikahan, kelahiran, ataupun kematian memiliki nilai penting dalam kehidupan di dunia. Tetapi, secara tidak langsung hal itu juga akhirnya berkaitan erat dengan ego ataupun emosional masing-masing masyarakat. Rasa superior terhadap yang lainnya menjadi alasan setiap kegiatan harus dijalankan secara besar-besaran. Tidak menutup kemungkinan sebagian anggota masyarakat ataupun keluarga harus meminjam biaya untuk kepentingan tersebut. Fakta ini kemudian dapat dilihat sebagai sebuah tindakan sia-sia (tanpa rencana) yang biasa terjadi. Banyak dari masyarakat tersebut kemudian tidak lagi mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah seperti makan, minum atau keperluan lainnya.

Setelah berbicara banyak tentang faktor kemiskinan dari alam dan kebiasaan masyarakat lokal, tidak seimbang rasanya jika tidak membedah kegagalan atau kelalaian pemerintah sebagai elite politik dalam mendaratkan kebijakannya terhadap penduduk daerah kabupaten Timor Tengah Selatan.

Tidak dapat dipungkiri kemiskinan menjadi langgeng dalam kehidupan masyarakat juga disebabkan oleh kurang efektifnya peran pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi dan gereja sebagai institusi keagamaan dominan dalam masyarakat Timor Tengah Selatan. Benar bahwa pemerintah pada dasarnya sudah memiliki rancangan program-program guna mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat daerah. Tetapi yang menjadi kendala adalah data observasi sebelum merancang program yang terkadang tidak sesuai. Padahal data tersebut nantinya dijadikan sebuah gambaran utuh permasalahan yang sedang terjadi di tengah masyarakat dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat agar pelayanan yang dilaksanakan nantinya akan efektif.

Patut disadari bahwa kelemahan pemerintah yang paling mendasar adalah perumusan program yang tidak menjawab permasalahan riil yang dihadapi oleh masyarakat. Pemerintah sendiri pada akhirnya memunculkan “jurang” pemisah yang membatasi rumusan kebijakan dan realita yang terjadi di masyarakat dengan berbagai alasan. Disamping itu, gereja sebagai salah satu lembaga elite agama juga terkadang tidak efektif dalam menangkap realita yang terjadi disekitar “halaman” bangunan. Menurut data hasil wawancara yang didapatkan oleh penulis dari beberapa komunitas pemuda lokal, salah satu kegiatan yang perlu diapresiasi dan didukung penuh oleh petinggi gereja dan pemerintah adalah mengadakan kerjasama dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang pesertanya meliputi pemuda, remaja dan juga beberapa orang tua di daerah Mollo Barat Kabupaten TTS. Melihat mayoritas pekerja jemaat adalah petani dan peternak yang masih mengandalkan hasil kebun dan peternakan maka gereja dan pemerintah sebagai satu golongan elite politik bersama tokoh-tokoh masyarakat yang ada sadar betul apa yang dibutuhkan sehingga harus menciptakan program-program mandiri yang diputuskan bersama guna membantu kedua belah pihak melaksanakan program pengentasan angka kemiskinan

yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah menjelaskan faktor-faktor penyebab kemiskinan yang disebabkan oleh kedua belah pihak dalam sebuah struktur masyarakat. Sudah sewajarnya seluruh elemen mengambil andil untuk berbenah dan menyikapi kemiskinan sesuai dengan faktor-faktor yang sudah dijelaskan diatas. Jika tidak maka akan muncul klaster masalah-masalah sosial baru di tengah masyarakat seperti: pencurian, pembunuhan, pemerkosaan dan masih banyak lagi (Seran, 2016).

### **Peran Politik Identitas dan Pertukaran Sosial menurut Para Ahli**

Sebelum masuk lebih dalam pembahasan politik identitas dan seluruh problem yang melingkarinya, akan lebih baik mengetahui terlebih dahulu mengenai identitas. Pengertian identitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah jati diri seorang manusia. Lebih lanjut, Robert Putnam dalam tulisannya menyatakan bahwa memiliki identitas yang sama berarti bahwa manusia bisa hidup dengan mengikat kerjasama dengan komunitas yang memiliki ciri dan rasa yang sama (Putnam, 2000). Maka asumsi yang dibangun oleh Castells, karena berangkatnya identitas ini dari internalisasi, yang mempengaruhi identitas adalah proses pemaknaan daripada aturan yang telah ditetapkan oleh satu institusi. Konstruksi identitas sendiri dalam prosesnya sangat bergantung pada beberapa hal, diantaranya bersumber dari konteks sejarah, geografi, biologi, institusi produktif dan reproduktif, memori kolektif, fantasi personal, kekuasaan dan juga sisi-sisi keagamaan. Sehingga dalam era informasi (*information age*) seperti sekarang ini, menurut Castells, tidak hanya akan melahirkan masyarakat jaringan (*network societies*) semata, tetapi juga turut mempengaruhi perubahan dalam berbagai bidang, termasuk di dalamnya bidang politik, budaya, ekonomi, dan juga kebudayaan. Castells mengemukakan bahwa identitas tidak hanya tentang bagaimana individu mengidentifikasi dirinya sendiri, tetapi juga bagaimana kelompok dominan memberikan klaim dan menginternalisasi seseorang atau kelompok tertentu yang dilekatkan pada ciri-ciri dan *streetipe* yang dilekatkan pada mereka. Dalam menentukan politik identitas, menurut Castells harus lebih dahulu dilakukan identifikasi bagaimana konstruksi sebuah identitas muncul yang menurutnya bisa dilihat dengan 3 model bentuk identitas yaitu (Castells, 2010):

a. *Legitimizing identity* atau legitimasi identitas, yaitu identitas yang dibangun oleh institusi (penguasa) yang dominan ada dalam kehidupan sosial. Institusi ini menunjukkan dominasinya dengan melekatkan sebuah identitas tertentu pada seseorang atau kelompok.

b. *Resistance identity* atau resistensi identitas, yaitu identitas yang dilekatkan oleh aktor aktor sosial tertentu dimana pemberian identitas tersebut dilakukan dalam kondisi tertekan karena adanya dominasi hingga memunculkan satu resistensi dan membentuk identitas baru yang berbeda dari kebanyakan anggota komunitas sosial yang lain, konstruksi identitas inilah yang oleh Coulhoun dimaknai sebagai politik identitas.

c. *Project identity* atau proyek identitas, konstruksi identitas pada model ini dilakukan oleh aktor sosial dari kelompok tertentu dengan tujuan membentuk identitas baru untuk bisa mencapai posisi-posisi tertentu dalam masyarakat, hal ini bisa terjadi sebagai implikasi dari gerakan sosial yang bisa merubah struktur sosial secara keseluruhan.

Masuk ke dalam proses pertukaran sosial yang diusung oleh Peter M. Blau. Berdasarkan teori ini, bahwa hubungan pertukaran sosial antara seseorang dengan orang lain terjadi karena adanya imbalan. jika dalam setiap pertukaran sosial terdapat unsur imbalan (*reward*), pengorbanan (*cost*), dan keuntungan (*profit*). Teori *Social Exchange* dari Peter M. Blau. menyatakan bahwa; “pertukaran sosial tidak hanya di dasarkan pada keputusan individu saja, tetapi individu yang masuk membangun hubungan sosial dengan kelompok, sehingga pada individu turut melekat posisi, jenjang, norma kelompok, dan kewenangan-kewenangannya.” (Susilo, 2008).

Perbedaan Teori Pertukaran Sosial Kontemporer dengan psikologi maupun ilmu ekonomi mikro terletak pada penekanannya struktur-struktur sosial tempat pertukaran terjadi. Sementara teoritikus

pertukaran terdahulu mengkaji relasi dua pihak, teoritikus kontemporer meletakkan pertukaran-pertukaran pada konteks jaringan yang lebih besar, dan menyelidiki pengaruh kesempatan-kesempatan struktural yang dimiliki aktor untuk mengadakan pertukaran dengan mitra berganti-ganti, terhadap kekuasaan, pembentukan koalisi, dan proses terkait (George Ritzer, 2011).

Blau berusaha mengembangkan sebuah teori pertukaran yang menggabungkan tingkah laku sosial dasar manusia dengan struktur masyarakat yang lebih luas, yakni antara kelompok, organisasi atau negara. Dengan kata lain, Blau ingin memusatkan perhatiannya pada pemahaman struktur sosial yang lebih luas berdasarkan analisa proses-proses sosial yang terjadi pada relasi diantara individu. Menurut Blau, tujuan dari studi tentang interaksi dari muka ke muka adalah meletakkan dasar untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang struktur sosial (Raho, 2007).

Menurut Peter Blau, pertukaran sosial memenuhi watak-watak dengan fungsi utama, yaitu: *Pertama*; Pembentukan pertalian pertemanan bagi pihak-pihak yang saling membuat persetujuan, baik pada strata (lapisan) yang sama maupun pada strata yang berbeda. *Kedua*; Meneguhkan Subordinasi atau dominasi, terutama terjadi jika interaksi dibangun dalam strata yang tidak sama. Dalam masyarakat yang paling sederhana, pertukaran sosial terjadi dalam bentuk *gift* (pemberian) dan *services*. *Gift* yang diterima tidaklah secara sukarela, namun diberikan di bawah *obligation* (kewajiban). Hasil pertukaran sosial tampak disadari menghasilkan dua kelompok atau lebih yang sangat berkepentingan didasarkan atas memperoleh keuntungan dan kekuasaan. Sisi lain pertukaran sosial adalah meningkatkan integritas sosial, membangun kepercayaan (*trust*), mendorong keberanian dan mengembangkan nilai-nilai kolektif. Dalam kaitan ini Blau menyatakan “resiprositas dan pertukaran diperluas dan digabung dengan pertumbuhan saling percaya yang bersifat paralel” (Liata, 2020).

Blau menekankan persetujuan sosial sebagai penghargaan yang umum. Bahkan "altruistik" perilaku dapat dimotivasi sebagian oleh harapan menerima rasa terima kasih dan persetujuan sosial, tetapi terlibat dalam perilaku tersebut dapat berarti bahwa individu harus melampaui kepentingan pribadi untuk menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan orang lain. Blau bahkan menerapkan perspektif teori pertukaran untuk hubungan percintaan, sangat jelas ini menunjukkan pentingnya ikatan emosional yang mendorong individu untuk mengidentifikasi dengan seksama berbagai ragam penghargaan dalam pertukaran, khususnya sosioemosional. Item material seperti hadiah yang dipertukarkan sepasang kekasih tidak dilihat dari nilai praktis atau nilai ekonomi, tetapi sebagai ekspresi sebagai simbol dari ikatan emosional bersama mereka (Syahri, 2017). Kontras antara hubungan jenis ini dan pertukaran ekonomi yang terjadi di pasar impersonal tercermin dalam perbedaan Blau antara imbalan intrinsik dan ekstrinsik. Pertanyaan mendasar yang diajukan Blau adalah bagaimana kehidupan sosial menjadi terorganisasi ke dalam struktur asosiasi dikalangan manusia yang semakin kompleks? (Goerge Ritzer, 2012).

### ***Dinamika Pertukaran Sosial dan Politik Identitas dalam Menangani Kemiskinan***

Martin Lukito Sinaga dalam tulisannya pernah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seperti, apakah kita bisa melangkaui politik identitas? Bisakah sebetuk dinamika identitas yang bukan politis mengemuka dan memberi makna bagi masyarakat, demi munculnya semacam *social-hope* diruang publik negri kita ini? dan Bisakah soalnya bukan menjadi proses yang penuh resah pada “esensi” dan fiksasi, tetapi lincah berkonsentrasi di hadapan proses-proses sosial diluar dirinya? (Sinaga, 2012) Dalam relitanya, jelas hal tersebut bukan merupakan hal yang mudah. Dewasa ini, politik identitas menjadi wadah pengkotak-kotakan masyarakat ke dalam unsur kesamaan yang kemudian bertujuan untuk menghancurkan semua hal yang tidak sama atau diluar dirinya.

Jika dilihat dari sudut pandang teori Castells, pemerintah sebagai sebuah institusi dominan yang bertanggungjawab dan menguasai suatu daerah dapat menjadi pemicu lahirnya politik identitas yang berasal dari masyarakat lokal yang mulai kehilangan kepercayaan terhadap kebijakan-kebijakan yang

diterapkan. Hal ini kemudian diperparah dengan kenyataan bahwa agama pun ikut mengalami proses *distorted* dan *disabling*, khususnya karena sistem kolonial telah pula merekonstruksi identitas dan kelembagaan agama sedemikian dalamnya. Sehingga saat agama hendak keluar dari dunia kolonial itu, lalu hendak “memulihkan” diri dan menempuh sejarahnya yang baru, ia gampang terjerumus memilih jalan politik identitas di atas (Sinaga, 2012).

Uniknya adalah identitas yang merupakan rangkaian proses panjang dalam diri manusia tersebut bisa dimodifikasi untuk sebuah kepentingan bersama yang lebih universal melalui unsur “kekitaannya” tersebut. Fakta ini kemudian dapat menjadikan politik identitas tidak hanya menjadi sebuah konsep perlawanan (resisten) lokal tetapi juga dapat menghasilkan harapan sosial (*social hope*) yang telah disebutkan sebelumnya. Kehadiran setiap identitas yang ada dalam masyarakat bukan hanya sebagai wujud kesetiaan terhadap konsep masing-masing, tetapi harus dijadikan sebagai bagian dari pengalaman bersama untuk menjaga suatu daerah tetap adil dan menyejahterakan semua orang didalamnya (Funay, 2020). Kepentingan-kepentingan pribadi yang dapat memotori suatu identitas tertentu harus segera ditekan dengan sebuah kepentingan kolektif atau bersama yang sifatnya positif.

Dengan kata lain, yang seharusnya terjadi adalah pengembalian pola pikir dan keterbukaan akan kritik dari luar yang sebenarnya sudah sering terjadi dalam konteks masyarakat di kabupaten Timor Tengah Selatan. Sehingga kehidupan yang ideal bagi seluruh masyarakat Timor Tengah Selatan bukan hanya sekedar angan, tetapi harus menjadi sebuah proses riil yang harus segera di lalui langkah demi langkah. Berkaca pada tujuan akhir teori Castells, proses ini menjadi konsep proyek identitas yang urgen atau harus segera dilakukan agar kehidupan yang diidam-idamkan dapat segera terwujud ditengah-tengah masyarakat.

Kedua belah pihak (elite dan akar rumput) harus berperan seimbang dan membentuk identitas baru untuk bisa mencapai posisi-posisi tertentu dalam masyarakat. Hal ini bisa terjadi sebagai implikasi dari gerakan sosial yang bisa merubah struktur sosial secara keseluruhan. Tujuan akhir yang seharusnya dicapai nantinya harus menyentuh semua kehidupan yang ada di kabupaten Timor tengah Selatan tanpa terkecuali, agar kemiskinan yang sudah ada sejak dulu itu paling tidak berangsur-angsur berkurang dalam dinamika kehidupan masyarakat lokal.

Lebih lanjut, pola-pola elaborasi untuk meretas masalah kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan bisa diawali dengan menjunjung tinggi dualitas komunikasi dalam sebuah hubungan pertukaran sosial. Dualitas yang dimaksud adalah mengusahakan komunikasi yang otentik dan transformatif. Dalam hal ini, unsur otentik perlu dijunjung tinggi untuk menghindari adanya tujuan-tujuan terselubung dalam sebuah hubungan mutualisme yang ingin dijalin antara elite dan akar rumput. Sedangkan, transformatif menjadi soal lain yang perlu diingat untuk tercapainya tujuan akhir dan bertahannya sebuah hubungan yang saling menguntungkan. Pihak pemerintah sebagai pengambil kebijakan perlu untuk menjaratkan program-program dan kebijakan-kebijakannya dengan tepat, dan masyarakat perlu untuk mengusahakan mutu kehidupannya mulai dari bawah hingga menjadi komunitas “dewasa” dalam dimensi ekonomi.

Setelah memiliki komitmen terhadap terciptanya sebuah komunikasi. Pihak pemerintah sebagai elite politik dan masyarakat dalam suatu realitas kehidupan bersama harus mulai menyatukan pemikiran dan menyaring aspirasi guna mengetahui kelemahan dan kelebihan yang ada dalam suatu tatanan penduduk. Proses ini jelas menjadi salah satu elemen yang juga dimaksudkan dalam pemikiran Blau. Ia berpandangan bahwa perilaku dapat dimotivasi sebagian oleh harapan menerima rasa terima kasih dan persetujuan sosial, tetapi terlibat dalam perilaku tersebut dapat berarti bahwa individu harus melampaui kepentingan pribadi untuk menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan orang lain. Sangat jelas ini menunjukkan pentingnya ikatan emosional yang mendorong individu untuk mengidentifikasi dengan seksama berbagai ragam penghargaan dalam pertukaran, khususnya sosioemosional. Item material seperti hadiah yang dipertukarkan tidak dilihat dari nilai praktis atau nilai ekonomi, tetapi sebagai ekspresi sebagai simbol dari ikatan emosional bersama mereka (Syahri,

2017). Oleh karena itu, langkah ini menjadi salah satu yang perlu dikomunikasikan dan dilakukan untuk membentuk satu visi dalam meretas kemiskinan di kabupaten Timor Tengah Selatan.

Proses teakhir yang tidak kalah pentingnya adalah keterbukaan akan kritisitasi budaya atau kebiasaan masyarakat dan regulasi kebijakan ekonomi pemerintah. Dengan berpegang pada pandangan bahwa pembangunan merupakan penjelmaan manusia dalam pengharapannya dengan lingkungan alam dan sosialnya – dengan ruang dimana ia hidup – dan dalam pengharapannya dengan waktu, peluang dan pilihan, kesinambungan dan perubahan, antara sejarah dan masa depan (Soedjatmoko, 1995). Maka menjadi jelas bahwakedua belah pihak sebagai sesama manusia yang menajdi bagian dalam pembangunan harus dewasa terhadap segala bentuk masukan pendapat-pendapat yang bersifat positif. Disamping itu, kesadaran akan adanya sebuah citacita bersama untuk mutu kehidupan yang lebih baik tidak menutup kemungkinan makan menjadi sebuah alasan yang kuat sehingga penerapan program-program peretasan kemiskinan nantinya tepat sasaran dan mudah diterima oleh masyarakat lokal.

Dalam pembahasan mengenai peran pemerintah, biasanya masyarakat menerima begitu saja peraturan-peraturan yang dibuat seolah-olah memang sudah seharusnya terjadi. Jika berbicara mengenai regulasi kebijakan ekonomi, apa sebenarnya fungsi pemerintah dalam bidang ekonomi? Ada tiga fungsi ekonomi yang harus diembanoleh pemerintah, yaitu efisiensi, keadilan, dan stabilitas. Tindakan pemerintah yang menyangkut efisiensi berupa segala upaya untuk memperbaiki kegagalan pasar seperti misalnya monopoli. Program pemerintah untuk meningkatkan keadilan mencakup berbagai cara, seperti pemerataan pendapatan agar mencerminkan kepentingan seluruh masyarakat, termasuk golongan miskin dan tertindas. Kebijakan stabilisasi berusaha mengikis fluktuasi tajam dari siklus ekonomi dengan cara menekan angka pengangguran dan inflasi, serta mempercepat laju pertumbuhan ekonomi (Samuelson & Nordhaus, 1996).

Kebijakan-kebijakan yang diambil dalam dimensi pembangunan dan ekonomi diharapkan tidak terlepas dari tradisi, melainkan menggunakan ataupun mentransformasi tradisi menjadi jalan yang bisa digunakan oleh masyarakat lokal. Hal ini perlu dilakukan karena kedua elemen tersebut berkaitan satu dengan lainnya secara dialektis dalam konteks kehidupan di kabupaten Timor Tengah Selatan. Semakin kuat integrasi kritis budaya suatu daerah, semakin kuat pula proses pemilahan dampak negatif dari lompatan budaya yang terjadi saat ini. Sehingga pada akhirnya hal ini dilakukan karena budaya manusia tidak anti terhadap pembangunan ataupun kemajuan zaman, akan tetapi budaya membantu meletakkan perubahan pada tempatnya jika dilakukan dengan melalui proses kritisitasi dan terbuka terhadap elaborasi elemen kehidupan baru yang masuk untuk bertransformasi kearah yang lebih baik.

Guna menciptakan sebuah transaksi atau hubungan saling menguntungkan, Blau berusaha mengembangkan sebuah teori pertukaran yang menggabungkan tingkah laku sosial dasar manusia dengan struktur masyarakat yang lebih luas, yakni antara kelompok, organisasi atau negara. Dengan kata lain, Blau ingin memusatkan perhatiannya pada pemahaman struktur sosial yang lebih luas berdasarkan analisa proses-proses sosial yang terjadi pada relasi diantara individu. Penggunaan peluang ini jelas membutuhkan lebih dari sekedar strujtur organiasi tanpa eksekutor atau sekedar gerakan kelompok kecil buruh dan kaum tani. Dibutuhkan hubungan yang lebih besar dan kuat, serta mempertemukan semua unsur didalamnya (Hadiz, 2005). Berefleksi dari pendapat tersebut, jelas diperlukan seluruh unsur-unsur penopang untuk menggunakan politik identitas sebagai sebuah kendaraan dalam bidang pembangunan ekonomi masyarakat. unsur-unsur tersebut adalah Aktor, Struktur, Perjanjian dan Peraturan, serta keuntungan dan hukuman (*reward dan punishment*). Unsur-unsur inilah yang kemudian harus diformulasikan agar politik identitas dapat menjadi sebuah gerakan masyarakat dengan tujuan universal dan membangun.

Masalah terakhir yang harus dibersihkan adalah bagaimana caranya agar semua proses elaborasi mutual yang telah diusahakan tidak dirasuki oleh para penggiat kapitalis yang notabene memiliki



kekuasaan untuk “mematikan” usaha-usaha yang telah dijalankan oleh masyarakat lokal. Jika realitas politik ekonomi kotor ini tidak berubah, kita khawatir ide demokrasi ekonomi (berpusat pada rakyat) akan kembali buyar dan hanya menjadi mimpi (Denny, 2006). Realitas ini harus menjadi pekerjaan rumah bersama jika ingin menaikkan mutu hidup masyarakat lokal. Dengan dilakukannya semua proses yang telah dijelaskan di atas, serta dipenuhinya semua unsur yang diperlukan dalam sebuah hubungan pertukaran sosial yang bersifat mutual, diharapkan baik rakyat maupun pemerintah memainkan perannya dengan maksimal tanpa adanya kepentingan-kepentingan di dalamnya.

Produksi ekonomi nantinya harus dikerjakan oleh semua warga masyarakat dan hasilnya harus dibagi/didistribusikan secara lebih merata kepada semua dan secara lebih adil (Mubyarto, 2000). Ini berarti bahwa seluruh elemen masyarakat yang ada di kabupaten Timor Tengah Selatan beserta pemerintah harus memainkan perannya masing-masing secara kooperatif dan menjunjung tinggi sinergisitas. Lebih lanjut, negara harus menjamin tercapainya garis kemakmuran masyarakat, tanpa mengorbankan masyarakat yang lainnya. Setiap anggota masyarakat harus mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dasarnya sehingga dapat hidup secara layak dan mendapatkan keadilan.

#### 4. KESIMPULAN

Harus diakui bahwa masalah kemiskinan menjadi salah satu momok yang paling menakutkan dalam konteks negara berkembang. Hal ini kemudian diperparah oleh keadaan negara Indonesia yang berbentuk kepulauan yang mengakibatkan pemusatan mutu hidup masyarakat menjadi sangat susah dicapai. Dalam konteks hidup masyarakat yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: faktor alam (kurangnya curah hujan dan kondisi tanah yang berbatu), faktor dari masyarakat (lemahnya kesadaran akan pendidikan dan masih adanya kebiasaan yang menghambat pertumbuhan ekonomi), serta faktor dari pemerintah (kurangnya sarana dan prasarana pendidikan dan beberapa kebijakan yang tidak tepat sasaran). Oleh karena itu, dibutuhkan hubungan yang saling menguntungkan antara elite dan akar rumput sebagai sebuah tatanan sosial yang utuh.

Politik identitas dalam penerapannya juga kemudian dapat dimodifikasi menjadi gerakan lokal yang tidak hanya memunculkan pelawanan lokal tetapi juga harapan sosial bagi masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dengan adanya kritisasi dalam politik identitas dan regulasi kebijakan ekonomi pada pemerintah diharapkan dapat menjadi pintu pembuka terciptanya sebuah elaborasi dan pertukaran sosial antara kedua belah pihak untuk mencapai sebuah tujuan yang lebih universal. Bagian akhir yang perlu diingat adalah kelengkapan unsur-unsur dalam sebuah sistem formal penyatuan kedua belah pihak berupa: aktor sosial, struktur formal, perjanjian dan peraturan, serta *reward* dan *punishment*. Jika semua elemen sudah di formulasikan dengan baik, bukan tidak mungkin elaborasi yang sudah dirumuskan sejak awal dapat menjawab permasalahan kemiskinan yang terjadi di kabupaten Timor Tengah Selatan, provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, R. (2012). *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur*. Bandung: Institut Pertanian Bandung.
- Blau, P. M. (1964). *Exchange and Power in Social Life*. New York: Transaction Publishers.
- Castells, M. (2010). *The Power of Identity: The Information Age; Economy, Society, and Culture*. United Kingdom: Blackwell Company.
- Denny, A. J. (2006). *Membaca Isu Politik*. Yogyakarta: LkiS.
- Funay, Y. E. N. (2020). *Sabalong Samalewa: Falsafah Hidup sebagai Local Ethic dalam Relasi Lintas Agama di Tana Sumbawa*. Universitas Kristen Satya Wacana.

- Hadiz, V. R. (2005). *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto*. Jakarta: LP3ES.
- Heyes, C. (2007). Identity Politics. Retrieved from [Plato.Stanford.edu/entries/identity politics](https://plato.stanford.edu/entries/identity-politics)
- Johnson, D. P. (2008). *Contemporary Sociological Theory An Integrated Multi-Level Approach*. New York: Springer.
- Liata, N. (2020). Relasi Pertukaran Sosial antara Masyarakat dan Partai Politik. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, 1(1). Retrieved from <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/jsai/article/view/483>
- Messakh, J. J., & Punuf, D. (2020). Tingkat Kepedulian Peserta Didik Terhadap Masalah Kerentanan Air di Daerah Semi Ringkai Kabupaten Timor Tengah Selatan. In *Conference: Seminar Nasional Geografi 2019*. [https://www.researchgate.net/publication/338883067\\_Tingkat\\_Kepedulian\\_Peserta\\_Didik\\_Terhadap\\_Masalah\\_Kerentanan\\_Air\\_di\\_Daerah\\_Semi\\_Ringkai\\_Kabupaten\\_Timor\\_Tengah\\_Selatan](https://www.researchgate.net/publication/338883067_Tingkat_Kepedulian_Peserta_Didik_Terhadap_Masalah_Kerentanan_Air_di_Daerah_Semi_Ringkai_Kabupaten_Timor_Tengah_Selatan).
- Mubyarto. (2000). *Reformasi Ekonomi Menuju Sistem Ekonomi Kerakyatan, dalam Menuju Tata Indonesia Baru*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Mulia, S. M. (2012). *Politik Identitas: Ancaman Terhadap Masa Depan Pluralisme di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: the Collapse and The Revival of The American Community*. New York: Simon & Schuster.
- Raho, B. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Ritzer, George. (2011). *Handbook Teori Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Ritzer, Goerge. (2012). *Teori Sosiologi; Dari Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Posmodern*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (1996). *Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sen, A. (2016). *Kekerasan dan Identitas*. Tangerang Selatan: CV. Margin Kiri.
- Seran, S. (2016). *Pendidikan & Pertumbuhan Ekonomi Versus Kemiskinan Penduduk; Kasus Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Yogyakarta: Deepublish.
- Setyaningrum, A. (2005). *Mandatory Politik Perlawanan*. Yogyakarta: IRE.
- Sinaga, M. L. (2012). *Melangkaui Politik Identitas, Menggapai Dinamika Identitas*. Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi.
- Soedjatmoko. (1995). *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Statistik, B. pusat. (2019). *statistik kesejahteraan rakyat Kabupaten timor tengah selatan tahun 2019*. NTT.
- Susilo, R. K. (2008). *20 Tokoh Sosiologi Modern: Biografi Para Peletak Sosiologi Modern*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Syahri, M. (2017). *Teori Pertukaran Sosial*.